

## Resistensi Pedagang Kaki Lima di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray pada Kebijakan Relokasi ke Gedung PKL Intan Medina Kabupaten Garut

Ferdian Hilmi Riswandi<sup>1</sup>, Verry Damayanti<sup>2\*</sup>

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ferdianhilmi18@gmail.com<sup>1</sup>, verrydamayanti0904@gmail.com<sup>2\*</sup>

**Abstract.** Garut Regency is one of the areas with a fairly high development of the number of street vendors, especially in Garut Kota District, resulting in irregular traffic, both vehicle movements on the road body and pedestrian movements on pedestrian paths and reduced urbanaesthetic value so that it seems shabby. Efforts to organize and regulate street vendors carried out by the Garut Regency Government are by relocating street vendors, especially those in the red zone, especially on Jl. Ahmad Yani and Jl. Cikuray to the Intan Medina PKL Building in 2015. The Intan Medina PKL Building, which was originally planned as a street vendors relocation location, in fact until 2023 the building has not functioned optimally and is abandoned. The relocation policy carried out by the Garut Regency Government is considered to reduce the opportunities and income of street vendors so that resistance occurs. This study aims to identify the forms and causes of street vendors resistance on Jl. Ahmad Yani and Jl. Cikuray to the relocation policy to the Intan Medina PKL Building. The approach method in this study is descriptive research with a qualitative approach. The research method involved field observations and in-depth interviews with street vendors and related policy stakeholders. The forms of resistance of street vendors vary, ranging from open resistance or rejection such as demonstrations, installation of rejection banners and closed resistance such as pretending not to know and still selling at the initial location. The causes of resistance of street vendors include relocation locations far from crowds, long adaptation times, fears of losing buyers, and declining income of traders.

**Keywords:** *Resistance, Street Vendors, Relocation.*

**Abstrak.** Kabupaten Garut menjadi salah satu wilayah dengan perkembangan jumlah PKL yang cukup tinggi khususnya di Kecamatan Garut Kota sehingga mengakibatkan lalu lintas yang menjadi tidak teratur baik pergerakan kendaraan di badan jalan maupun pergerakan pejalan kaki di jalur pedestrian dan berkurangnya nilai estetika perkotaan sehingga terkesan kumuh. Upaya penataan dan penertiban PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut yaitu dengan kebijakan merelokasi PKL terutama yang berada di zona merah khususnya di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray ke Gedung PKL Intan Medina pada tahun 2015. Gedung PKL Intan Medina yang pada awalnya direncanakan sebagai lokasi relokasi PKL pada kenyataannya hingga tahun 2023 gedung tersebut belum berfungsi secara optimal dan terbengkalai. Kebijakan relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dianggap menurunkan peluang dan pendapatan para PKL sehingga terjadinya resistensi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk dan penyebab resistensi PKL di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray Terhadap kebijakan relokasi ke Gedung PKL Intan Medina. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian melibatkan observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap pedagang kaki lima dan pemangku kebijakan terkait. Bentuk resistensi para pedagang kaki lima beragam, mulai dari resistensi atau penolakan terbuka seperti demonstrasi, pemasangan spanduk penolakan serta resistensi tertutup seperti pura-pura tidak tahu dan tetap berjualan di lokasi awal. Penyebab resistensi para pedagang kaki lima diantaranya meliputi lokasi relokasi yang jauh dari keramaian, waktu adaptasi yang lama, kekhawatiran kehilangan pembeli, serta menurunnya pendapatan para pedagang.

**Kata Kunci:** *Resistensi, Pedagang Kaki Lima, Relokasi.*

## A. Pendahuluan

Sektor informal di Indonesia, termasuk aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL), terus berkembang pesat sebagai upaya masyarakat untuk bertahan hidup karena ketidakmampuan sektor formal menyerap seluruh tenaga kerja. Sektor informal mencakup kegiatan ekonomi kecil yang tidak teratur, tidak diatur oleh peraturan, dan sering terjadi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah [3], [11]. Aktivitas PKL, yang tidak terakomodasi dalam rencana tata ruang kota, seringkali dianggap mengganggu fungsi dan estetika ruang publik kota (Kasmad & Alwi, 2015).

Pandangan terhadap PKL terbagi menjadi dua; sudut pandang positif melihat PKL sebagai sumber pekerjaan mandiri yang dapat mendorong kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi lokal, sementara sudut pandang negatif melihat sektor informal ini sebagai penghambat pengembangan ekonomi dan merusak ketertiban serta kebersihan kota [9]. Menurut [2], regulasi dan pengaturan terhadap PKL merupakan tantangan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Kabupaten Garut, khususnya di Kecamatan Garut Kota, menghadapi peningkatan jumlah PKL yang signifikan, menyebabkan gangguan lalu lintas dan penurunan estetika perkotaan. Untuk mengelola dan memberdayakan jumlah PKL yang terus bertambah, Pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 205 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan: Keputusan Bupati Garut Nomor 511.23/ Kep. 790-Admrek/ 2014 tentang Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Garut; Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/ Kep. 201-Satpol PP/ 2015 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Garut; dan Keputusan Bupati Garut Nomor 511.23/ Kep. 528-Admrek/ 2015 tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota yang selanjutnya telah mencoba merelokasi PKL dari area yang padat, seperti Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray, ke Gedung PKL Intan Medina. Namun, gedung yang dibangun pada 2015 ini tidak berhasil menjadi lokasi relokasi yang efektif, dengan banyak lapak yang tidak ditempati dan PKL kembali berjualan di lokasi asal mereka [10].

Kebijakan relokasi ini menimbulkan resistensi dari PKL, yang mengalami penurunan pendapatan akibat berpindah lokasi. PKL tetap ingin berjualan di pusat kota yang ramai dan bersedia diatur asal mereka bisa tetap berada di area tersebut. Menurut Tatang, Pengurus Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKG), resistensi ini terjadi karena para PKL merasa relokasi tersebut tidak mendukung keberlanjutan usaha mereka [6]. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dan mengatasi resistensi ini agar kebijakan relokasi PKL di masa mendatang dapat diterima dengan lebih baik.

Adapun Menurut Scott dalam [1], resistensi adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat kelas rendah dengan tujuan untuk meredakan atau menolak tuntutan-tuntutan tertentu. Resistensi masyarakat menurut Scott dalam [1], resistensi masyarakat dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, resistensi yang muncul secara langsung disebabkan oleh faktor-faktor seperti penindasan, ancaman, tekanan, atau paksaan yang berasal dari pemerintah, pemilik modal, atau pihak lain. Kedua, resistensi yang timbul secara tidak langsung terjadi melalui perlawanan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak terang-terangan. Menurut Siahaan dalam [1], berpendapat bahwa kalangan miskin melakukan resistensi bukan karena ingin menciptakan kerusakan, melainkan karena keterbatasan alternatif sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan pandangan serta tekanan mereka terhadap perubahan.

Selanjutnya berikut merupakan *timeline* kebijakan relokasi Pemerintah Kabupaten Garut:

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Resistensi Pedagang Kaki Lima di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray Pada Kebijakan Relokasi ke Gedung PKL Intan Medina Kabupaten Garut”. Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana bentuk dan penyebab terjadinya resistensi PKL di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray pada kebijakan relokasi ke Gedung PKL Intan Medina Kabupaten Garut?”. Selanjutnya tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk dan penyebab resistensi PKL di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray pada kebijakan relokasi ke Gedung PKL Intan Medina

Kabupaten Garut agar diharapkan tidak terjadi resistensi kembali pada saat adanya kebijakan relokasi PKL di masa yang akan datang di Kabupaten Garut.

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak memilah - milah atau mencari faktor - faktor atau variabel tertentu [4]. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan kajian literatur. Dengan teknik pengambilan responden wawancara yaitu purposive sampling dengan jumlah responden yaitu 13 responden yang diantaranya 10 responden pedagang kaki lima dan 3 responden pemangku kebijakan terkait. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut merupakan *timeline* kebijakan relokasi Pemerintah Kabupaten Garut:

**Tabel 1.** *Timeline* Kebijakan Relokasi Pemerintah Kabupaten Garut

No.	Tahun	Penjelasan
1	2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya merealisasikan program Gerakan Garut Bersih oleh Bupati Garut dan Wakil Bupati yaitu dengan penataan kota termasuk di dalamnya penertiban pedagang kaki lima yang berada di zona merah.</li> <li>• Sosialisasi awal kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang berada di zona merah.</li> <li>• Pembangunan Gedung PKL Intan Medina 1 dan 2 yang direncanakan sebagai lokasi relokasi pedagang kaki lima yang berada di zona merah melalui dana APBD Kabupaten Garut tahun 2014, peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Garut pada 17 Juli 2014.</li> </ul>
2	2014 - 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diterbitkan Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 yang salah satunya menjelaskan mengenai standar lingkungan perumahan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan kota khususnya penataan pedagang kaki lima, yang kemudian diperkuat dengan Perda Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.</li> <li>• Kemudian lebih dikonkretkan melalui tiga Keputusan Bupati Garut, diantaranya yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keppub Garut Nomor 511.23/ Kep. 790-Admrek/ 2014 tentang Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Garut;</li> </ul> </li> </ul>

No.	Tahun	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Keppub Garut Nomor 511.3/ Kep. 201-Satpol PP/ 2015 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Garut; dan</li> <li>c. Keppub Garut Nomor 511.23/ Kep. 528-Admrek/ 2015 tentang Penetapan Lokasi Sementara Bagi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan proses sosialisasi secara bertahap mengenai Perda dan kebijakan relokasi melalui pembentukan satuan tugas Pemberdayaan dan Penataan PKL yang terdiri dari beberapa instansi yang dimulai dari dilaksanakan rapat antar instansi yang terkait dengan unsur kebijakan relokasi pedagang kaki lima kemudian melibatkan perwakilan-perwakilan pedagang melalui pengurus LPKLG untuk membuat dasar kesepakatan proses relokasi yang akan dilakukan.</li> <li>• Melakukan pendataan PKL diantaranya meliputi jumlah dan kapasitas pedagang yang akan dipindahkan.</li> </ul>
3	2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedung PKL Intan Medina 1 dan 2 selesai dibangun dan akan diperuntukkan sebagai lokasi relokasi pedagang kaki lima yang berjualan di zona merah Kecamatan Garut Kota serta pengelolaan di lapangannya diberikan kepada Ketua Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG).</li> <li>• Proses pemindahan pedagang kaki lima yang berjualan di zona merah secara bertahap ke Gedung PKL Intan Medina 1 dan 2.</li> <li>• Upaya relokasi PKL ke Gedung PKL Intan Medina 1 dan 2 dinilai kurang berhasil dilakukan, dikarenakan PKL perlahan kembali berjualan di zona merah yang merupakan lokasi yang dilarang berjualan oleh Pemerintah Kabupaten Garut.</li> </ul>
4	2016	<p>Para pedagang melalui Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG) meminta untuk dilakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Garut yang pada akhirnya Bupati Garut mengizinkan para PKL yang tergabung dalam LPKLG untuk kembali berdagang di beberapa titik di zona merah dengan catatan pada lokasi berjualan tidak terdapat banyak toko.</p>

No.	Tahun	Penjelasan
5	2019	Pemerintah Kabupaten Garut kembali menggiatkan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di zona merah lokasi berjualan salah satunya dengan ditempatkan tim pemberdayaan dan penataan PKL serta terdapat informasi larangan aktivitas PKL pada setiap 50 meter.
6	2024	Pj. Bupati Garut kembali mempertimbangkan akan melakukan kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang berjualan di zona merah ke lokasi yang baru.

Sumber: Hasil olahan peneliti dari berbagai sumber, 2024

### Bentuk Resistensi Pedagang Kaki Lima

Berikut adalah hasil penelitian mengenai bentuk resistensi pedagang kaki lima di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray pada kebijakan relokasi yang disajikan dalam tabel rekapitulasi bentuk resistensi pedagang kaki lima.

**Tabel 2.** Bentuk Resistensi Pedagang Kaki Lima

No.	Respon den Pedagang Kaki Lima	Bentuk Resistensi								
		Resistensi Terbuka		Resistensi Tertutup						
		Demonstrasi	Protes Sosial	Pura-pura patuh	Pura-pura tidak tahu	Melakukan sabotase	Berbi cara secara rahasia	Membakar	Menolak kategori yang dipaksakan oleh pemerintah	Menarik kembali rasa hormat kepada pemerintah
1	Respon den 1  (Pedagang Figura dan Ketua Lemba ga Pedaga ng Kaki	√			√					

	Lima Garut)									
2	Respon den 2  (Pedag ang Es Campu r)	√					√			
3	Respon den 3  (Pedag ang Jasa Perma k)	√	√	√					√	
4	Respon den 4  (Pedag ang Makan an dan Minum an)	√		√					√	
5	Respon den 5  (Pedag ang Ayam Goreng )	√	√							
6	Respon den 6	√							√	

	(Pedagang Buah-buahan)									
7	Respon den 7  (Pedagang Pakaian)			√	√					
8	Respon den 8  (Pedagang Mie Ayam)	√								
9	Respon den 9  (Pedagang Pakaian)			√						
10	Respon den 10  (Pedagang Mainan)		√							√

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2024

Mayoritas pedagang kaki lima di Garut Kota, khususnya di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray, menolak kebijakan relokasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Mereka lebih menginginkan pemberdayaan ekonomi di lokasi yang sudah ada daripada dipindahkan ke tempat yang kurang strategis, dengan kekhawatiran akan berkurangnya pendapatan jika relokasi dilakukan. Para pedagang, yang sebagian besar telah berjualan di lokasi

tersebut selama bertahun-tahun dan memiliki pelanggan tetap, merasa relokasi akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha.

Resistensi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima beragam, mulai dari resistensi terbuka seperti demonstrasi hingga resistensi tertutup seperti kembali berjualan di lokasi awal meski sudah ada arahan relokasi. Demonstrasi ini biasanya diorganisir oleh Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LKPLG) dan sering kali melibatkan aksi-aksi di depan kantor pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tingkat Pendidikan para pedagang yang rata-rata SD dan SMP, juga membuat mereka kurang siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang signifikan seperti relokasi, sehingga mereka cenderung mempertahankan tempat berjualan yang sudah dikenal. Selain itu, pedagang juga melakukan diskusi internal dan dengan Bupati Garut untuk mencari solusi yang lebih menguntungkan.

Jenis barang dagangan yang dijual turut memengaruhi bentuk resistensi yang dilakukan oleh para pedagang. Pedagang makanan dan minuman, misalnya, sangat bergantung pada lokasi strategis dengan arus pejalan kaki yang tinggi untuk menjaga kualitas dan penjualan barang dagangan yang dijual. Pedagang barang elektronik dan pakaian juga membutuhkan lokasi yang ramai untuk memaksimalkan penjualan, sehingga relokasi ke tempat yang kurang strategis dinilai merugikan.

Sarana fisik yang digunakan oleh pedagang juga memengaruhi cara mereka melakukan resistensi. Pedagang dengan sarana semi permanen seperti kios atau meja kayu cenderung melakukan perlawanan yang lebih terstruktur karena sudah berinvestasi besar pada sarana berjualan. Mereka sering kali terlibat dalam negosiasi intensif dengan pihak berwenang untuk mempertahankan lapak mereka. Di sisi lain, pedagang dengan sarana non permanen seperti gerobak dorong lebih fleksibel, namun juga lebih mudah dipindahkan oleh aparat.

Resistensi yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima ini menunjukkan bahwa mereka berusaha mempertahankan kelangsungan hidup dengan cara mempertahankan lokasi strategis yang sudah dikenal. Aksi-aksi yang dilakukan bukan sekadar perlawanan spontan, tetapi merupakan strategi bertahan yang didasarkan pada pemahaman mendalam tentang pentingnya lokasi strategis, waktu berjualan, dan keramaian pengunjung.

Pada akhirnya, para pedagang kaki lima di Kabupaten Garut berharap agar kebijakan pemerintah dapat lebih berpihak pada mereka, dengan memberikan solusi yang tidak hanya mempertimbangkan estetika kota, tetapi juga kelangsungan usaha dan kesejahteraan para pedagang. Para pedagang menuntut pemberdayaan ekonomi di lokasi yang sudah ada, dengan harapan dapat terus melangsungkan usaha mereka di tengah dinamika kebijakan pemerintah.



**Gambar 1.** Bentuk Resistensi Pedagang Kaki Lima

### **Penyebab Resistensi Pedagang Kaki Lima**

Berikut adalah hasil penelitian mengenai penyebab resistensi pedagang kaki lima di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray pada kebijakan relokasi yang disajikan dalam tabel rekapitulasi penyebab resistensi pedagang kaki lima.



**Tabel 3.** Penyebab Resistensi Pedagang Kaki Lima

No	Responden Pedagang Kaki Lima	Penyebab Resistensi					
		Zona nyaman di lokasi awal	Ketakutan kehilangan pelanggan	Tidak percaya pada kebijakan relokasi	Ketakutan kehilangan pekerjaan	Ketidakpastian keramaian pengunjung	Penurunan pendapatan
1	Responden 1  (Pedagang Figura dan Ketua Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut)	√				√	
2	Responden 2  (Pedagang Es Campur)		√			√	√
3	Responden 3  (Pedagang Jasa Permak)	√	√				√
4	Responden 4  (Pedagang Makanan dan			√		√	

	Minuman )						
5	Responden 5 (Pedagang Ayam Goreng)					√	
6	Responden 6 (Pedagang Buah-buahan)				√		√
7	Responden 7 (Pedagang Pakaian)					√	√
8	Responden 8 (Pedagang Mie Ayam)	√					√
9	Responden 9 (Pedagang Pakaian)		√				
10	Responden 10	√				√	

	(Pedagan g Mainan)						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2024

Resistensi pedagang kaki lima (PKL) di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray terhadap kebijakan relokasi ke Gedung PKL Intan Medina di Garut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Salah satu penyebab utama adalah lokasi relokasi yang jauh dari pusat keramaian. Gedung PKL Intan Medina terletak cukup jauh dari pusat kota, sehingga para pedagang khawatir kehilangan pelanggan tetap yang selama ini berada di lokasi strategis Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray, yang dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan arus pengunjung yang tinggi, sehingga pergeseran lokasi berjualan dapat berdampak signifikan pada volume pelanggan dan pendapatan pedagang.

Masa transisi dan adaptasi di lokasi baru juga menjadi tantangan besar, terutama bagi pedagang yang memiliki tingkat pendidikan terbatas, seperti lulusan SD dan SMP. Keterbatasan pendidikan ini membuat mereka kurang siap untuk mengelola perubahan besar seperti relokasi, yang seringkali mengakibatkan penurunan pendapatan selama periode adaptasi. Beberapa pedagang bahkan memilih untuk kembali ke lokasi awal di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray setelah hanya tiga bulan beroperasi di Gedung PKL Intan Medina, karena merasa tidak mampu bertahan dengan kondisi baru yang tidak mendukung.

Selanjutnya ketidakpuasan pedagang terhadap desain dan fasilitas di Gedung PKL Intan Medina karena pedagang merasa kebijakan tersebut tidak memperhatikan kebutuhan spesifik mereka. Lapak-lapak di gedung baru diseragamkan tanpa mempertimbangkan jenis dagangan yang berbeda-beda, yang mengakibatkan kesulitan dalam menata lapak sesuai dengan kebutuhan masing-masing pedagang. Misalnya, pedagang makanan dan minuman memerlukan fasilitas seperti akses air dan listrik yang dekat, sementara pedagang pakaian memerlukan ruang yang lebih luas untuk menampilkan produk mereka. Kurangnya mengakomodasi kebutuhan pedagang pada fasilitas ini semakin memperburuk situasi dan menghambat adaptasi pedagang.

Upaya yang dilakukan oleh Disperindag ESDM Kabupaten Garut, seperti sosialisasi dan pemberian door prize untuk menarik pengunjung ke Gedung PKL Intan Medina, terbukti tidak cukup efektif. Gedung PKL Intan Medina tetap sepi pengunjung, dan hal ini berdampak langsung pada pendapatan pedagang yang semakin menurun. Akibatnya, semakin banyak pedagang yang memilih untuk kembali berjualan di lokasi awal mereka di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray.

Pengurus LPKLG (Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut) menginginkan agar pedagang kaki lima tetap diizinkan berjualan di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray. Mereka berargumen bahwa lokasi tersebut ramai pengunjung. Selain itu, mereka berharap pemerintah melakukan penataan tertentu agar kawasan tersebut tidak terlihat kumuh. Para pedagang juga meminta adanya sosialisasi dan bantuan dari pemerintah selama masa transisi relokasi. Hal ini penting agar mereka tidak kehilangan pelanggan dan tetap bisa berjualan dengan lancar. Pemerintah diharapkan dapat memikirkan lokasi relokasi yang dekat dengan pusat keramaian dan mudah diakses oleh para pembeli. Di sisi lain, pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai tahapan dan jadwal relokasi. Kepastian ini sangat penting bagi para pedagang untuk merencanakan kegiatan bisnis mereka ke depan. Sosialisasi yang baik mengenai rencana dan kebijakan relokasi dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan kecemasan di kalangan pedagang.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bentuk resistensi atau penolakan dari para pedagang kaki lima di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray terhadap kebijakan relokasi sangat beragam, mencerminkan keragaman latar

belakang dan kebutuhan mereka. Resistensi terbuka merupakan salah satu bentuk yang paling menonjol, di mana para pedagang secara aktif menunjukkan ketidaksetujuan mereka melalui demonstrasi di depan kantor pemerintahan, protes sosial, serta pemasangan spanduk penolakan di sekitar area berjualan. Selain resistensi terbuka, ada juga resistensi tertutup yang dilakukan oleh para pedagang, seperti pura-pura patuh terhadap kebijakan pemerintah namun pada kenyataannya tidak sepenuhnya mematuhi arahan yang diberikan. Misalnya, para pedagang mungkin berpura-pura tidak tahu tentang larangan berjualan di zona merah atau mengabaikan instruksi relokasi dengan tetap berjualan di tempat yang telah ditetapkan sebagai lokasi terlarang oleh pemerintah. Terdapat juga pedagang yang menolak untuk menerima kategori yang dipaksakan oleh pemerintah, seperti klasifikasi jenis dagangan atau penempatan di lokasi relokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, jenis dagangan, dan sarana fisik berjualan mempengaruhi bentuk resistensi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Pedagang dengan pendidikan rendah cenderung sulit menerima kebijakan relokasi dan lebih memilih resistensi terbuka untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Jenis dagangan seperti makanan dan minuman sangat bergantung pada lokasi strategis untuk menarik pelanggan, sehingga relokasi ke tempat yang sepi dapat mengurangi pendapatan mereka secara signifikan. Pedagang dengan sarana fisik semi permanen merasa memiliki investasi besar di lokasi lama, sehingga mereka lebih cenderung mempertahankan lokasi tersebut melalui negosiasi atau demonstrasi.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan resistensi para pedagang kaki lima di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray terhadap kebijakan relokasi didorong oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utama adalah zona nyaman yang telah terbentuk di lokasi awal mereka berjualan karena pengunjung yang konsisten dan pelanggan tetap yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Ketakutan kehilangan pelanggan tetap ini menjadi salah satu penyebab pedagang menolak relokasi, karena pelanggan yang sudah terbiasa berbelanja di tempat yang mudah diakses kemungkinan besar tidak akan mau repot-repot mencari mereka di lokasi baru yang lebih jauh atau kurang strategis. Ketidakpastian mengenai keramaian pengunjung di lokasi baru juga menjadi faktor yang menambah kekhawatiran mereka. Penyebab resistensi ini tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, jenis dagangan, dan sarana fisik berjualan. Pedagang dengan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih rentan terhadap perubahan dan kurang mampu untuk menilai atau merencanakan strategi baru di tempat baru. Jenis dagangan yang mereka jual, seperti makanan dan minuman, sangat bergantung pada arus pengunjung yang tinggi, sehingga relokasi ke tempat yang sepi bisa berdampak negatif pada penjualan mereka. Selain itu, pedagang dengan sarana fisik semi permanen merasa memiliki investasi besar di lokasi lama, yang membuat mereka lebih cenderung mempertahankan tempat tersebut dengan segala cara, termasuk melakukan resistensi terbuka.

### **Acknowledge**

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan judul “Resistensi Pedagang Kaki Lima di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Cikuray Pada Kebijakan Relokasi ke Gedung PKL Intan Medina Kabupaten Garut.” Proses penyusunan penelitian ini bukanlah hal yang mudah, namun dengan bimbingan dan karunia dari Allah SWT, segala tantangan dan rintangan dapat dilalui.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Terutama kepada Bu Verry Damayanti, S.T., M.T., dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing penulis, memberikan arahan, masukan, dan ilmu yang sangat berharga selama proses penelitian ini berlangsung.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ibu dan Almarhum Ayah, yang selalu menjadi sumber inspirasi, doa, dan dukungan tanpa henti.

Keluarga penulis, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam setiap langkah perjalanan akademik ini, adalah kekuatan yang tak tergantikan. Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dorongan moral dan motivasi.

#### Daftar Pustaka

- [1] Alisjahbana. (2005). *Sisi Gelap Perkembangan Kota Resistensi Sektor Informal dalam Perspektif Sosiologis*. Laksbang Pressindo.
- [2] Amis, P. (2016). Symbolic politics, legalism and implementation: the case of street vendors in India. *Commonwealth Journal of Local Governance*, 18, 36–47. <https://doi.org/10.5130/cjlg.v0i18.4841>
- [3] Andreasmi, S., & Utomo, B. (2018). Resistensi Pedagang Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin. *JURNAL SWARNABHUMI : Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 3(2), 130. <https://doi.org/10.31851/swarnabhumi.v3i2.2604>
- [4] Damayanti, V. (2019). Potensi Pengembangan Infrastruktur Hijau dalam Upaya Mewujudkan Cimahi sebagai Kota Hijau Berkelanjutan. *ETHOS (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian)*, 7(2), 233–243. <https://doi.org/10.29313/ethos.v7i2.4560>
- [5] Dhea Viranti Alaydrus, & Ina Helena Agustina. (2022). Kepuasan Pengendara Motor Terhadap Penggunaan Smart system parking di Ruas Jalan Braga, Kota Bandung. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 54–60. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v2i1.928>
- [6] Ghani, H. (2019). Tak Mau Pindah Jualan, PKL Demo di Lokasi Pelantikan DPRD Garut. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4663982/tak-mau-pindah-jualan-pkl-demo-di-lokasi-pelantikan-dprd-garut>
- [7] Muhammad Fakhriza, & Ira Safitri Darwin. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kenyamanan Berjalan Kaki di Jalan Otto Iskandardinata Bandung. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 91–96. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v3i2.2646>
- [8] Muhammad Vino Fahlen, & Weishaguna. (2022). Studi Kinerja Walkability Jalur Pejalan Kaki. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 69–75. <https://doi.org/10.29313/jrpwk.v2i1.930>
- [9] Mustafa, A. I. (2008). Model transformasi sosial sektor informal : sejarah, teori, dan praksis pedagang kaki lima. In-Trans Publishing.
- [10] Pasciana, R., Pundenswari, P., & Sadrina, G. (2019). Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Untuk Memperindah Kota Garut. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 288–303. <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2649>
- [11] Sagir, S. (1989). *Membangun manusia karya: masalah ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia*. Pustaka Sinar Harapan, 1989.